

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis mengenai Implikasi Sanksi Adat Terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Adat di Sumba Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Berkaitan dengan implikasi sanksi adat dalam kasus kawin tangkap terdapat ketegangan antara tradisi adat yang mengakui dan menerapkan hukum adat maupun sanksi adat, yang dalam penyelesaian kasus perkawinan dan pemeliharaan nilai-nilai budaya dengan prinsip-prinsip hukum khususnya syarat-syarat sah perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dimana perkawinan dilaksanakan atas keinginan kedua belah pihak (pria dan wanita) bukan karena paksaan.
2. Terdapat ketegangan antara hukum adat dan hak asasi manusia kawin tangkap berakibat pada terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dimana mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan, penyiksaan, pemerkosan, atau perlakuan merendahkan yang hal tersebut berimplikasi bagi terhinya martabat manusia khususnya bagi perempuan sebagai korban. upaya untuk mencari keseimbangan melalui perubahan hukum dan kesepakatan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun tokoh adat merupakan langkah yang benar dan sebagai pendidikan yang bijaksana, yang bertujuan memastikan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan standar nasional dan internasional sambil memelihara warisan budaya dan tradisi adat.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, peneliti ingin mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi landasan untuk tindakan selanjutnya dalam upaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya serta tradisi adat di Indonesia Mendorong Implementasi dan Penegakan Hukum yang Kuat terkait dengan perlindungan hak

asasi manusia. Ini termasuk pemantauan dan penilaian terus-menerus terhadap pelaksanaan Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Penegakan hukum yang kuat akan membantu memastikan bahwa hak-hak individu dan kelompok dilindungi secara efektif. Selain peneliti menyarankan agar dilakukan Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Dialog dan Kolaborasi Antara Pemerintah dan Masyarakat Adat, Peningkatan Kapasitas Hukum Adat

Saran-saran ini dirancang untuk membantu Indonesia mencapai keseimbangan yang tepat antara pelestarian budaya dan perlindungan hak asasi manusia dalam perjalanan mereka menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil.